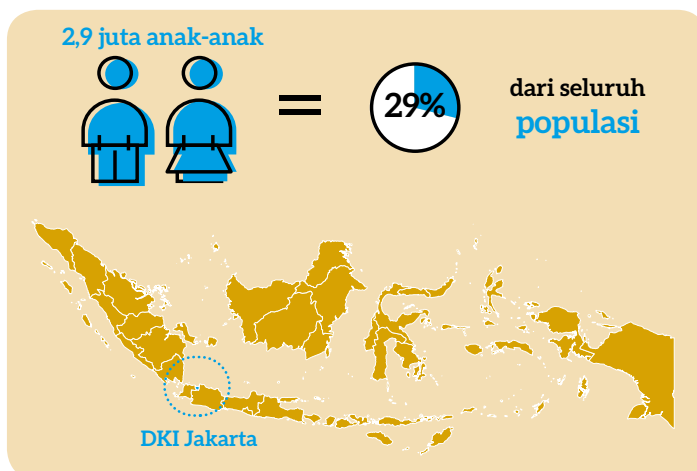




Pendahuluan

Profil singkat provinsi ini menyajikan indikator-indikator prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) yang terkait anak, berdasarkan survei nasional berbasis rumah tangga dan sumber data lainnya. Profil ini melengkapi *Laporan Baseline SDG tentang Anak-Anak di Indonesia* yang disusun oleh BAPPENAS dan UNICEF, untuk mendukung pemantauan dan penyusunan kebijakan berbasis bukti.

Provinsi DKI Jakarta termasuk provinsi dengan jumlah penduduk muda yang signifikan. Sebanyak 2,9 juta orang atau 29 persen dari total penduduk di provinsi ini adalah anak-anak. Diperlukan investasi strategis yang lebih signifikan untuk anak-anak dalam rangka mempercepat pencapaian SDG di provinsi ini.



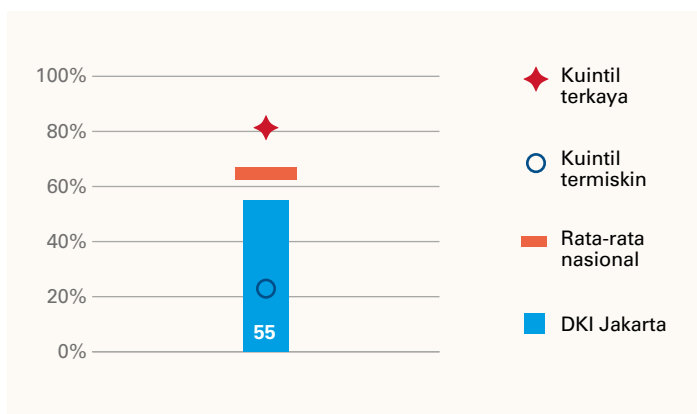
TUJUAN 1 PENGENTASAN KEMISKINAN



Sekitar 166.000 anak (5,7 persen) hidup di bawah garis kemiskinan provinsi pada tahun 2015 (Rp 16.024 per orang per hari). Namun, lebih banyak rumah tangga yang berada dalam posisi di atas garis kemiskinan dan hidup dengan pendapatan yang sedikit di atas garis kemiskinan. Selain itu, 55 persen anak mengalami deprivasi di dua dimensi kemiskinan non-pendapatan atau lebih, dengan ketimpangan yang mencolok antara rumah tangga termiskin dan terkaya.¹

Kondisi kemiskinan anak multidimensi di provinsi DKI Jakarta

	Persen	Jumlah (juta)
Populasi di bawah garis kemiskinan nasional	3,9	0,4
Anak-anak < 18 di bawah garis kemiskinan nasional	5,7	0,2
Anak-anak < 18 di bawah dua kali garis kemiskinan	48,4	1,4



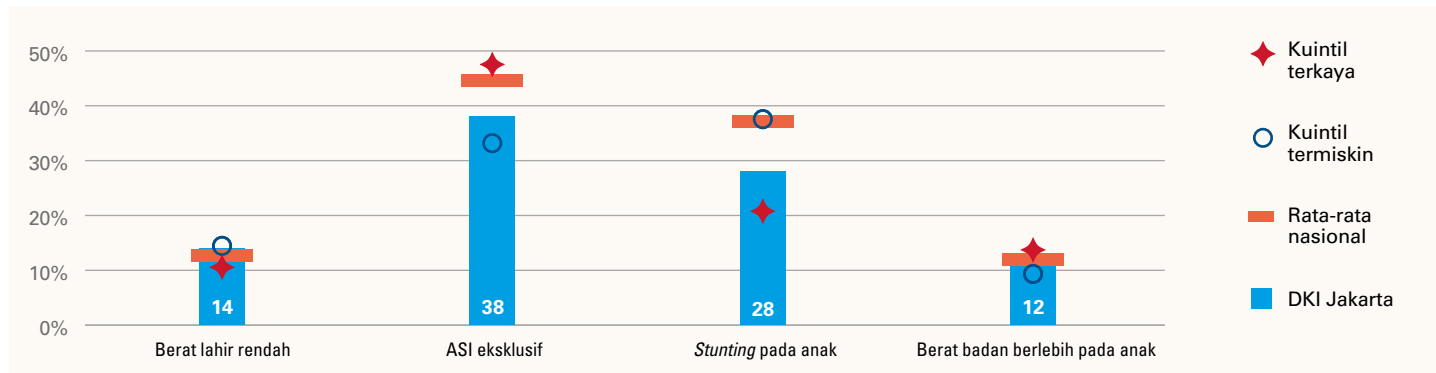
TUJUAN 2 PENGENTASAN KELAPARAN



Menerapkan praktik pemberian makan yang optimal sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan anak. Namun, hanya 38 persen bayi di Provinsi DKI Jakarta diberikan ASI eksklusif pada enam bulan pertama kehidupannya, yang berarti di bawah angka rata-rata nasional.

Prevalensi malnutrisi relatif tinggi, termasuk di antara anak-anak dari rumah tangga terkaya. Sekitar 14 persen bayi lahir dengan berat badan rendah, dan lebih dari satu di antara empat anak di bawah lima tahun mengalami *stunting* (tinggi badan rendah dibanding usia) pada tahun 2013.

Ketimpangan berdasarkan tingkat pendapatan dalam hasil pemberian makanan dan gizi anak



TUJUAN 3

KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN



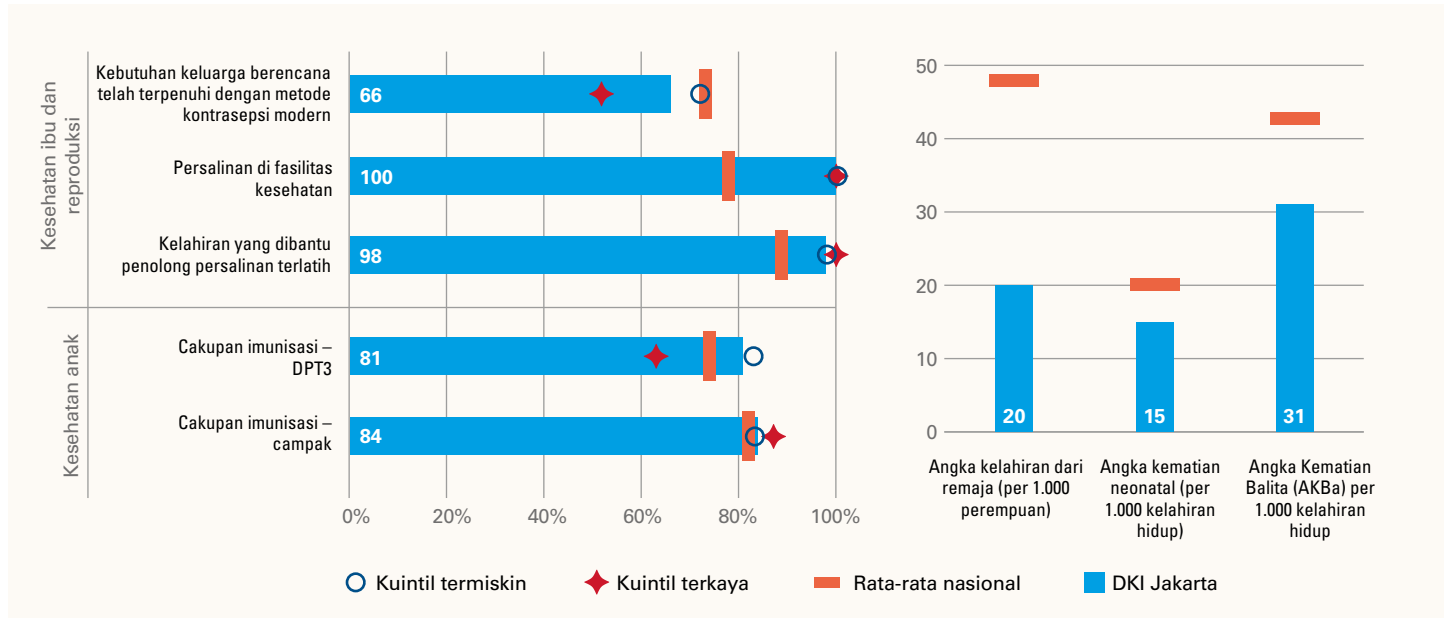
Angka kematian anak di Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu yang terendah di Indonesia. Untuk setiap 1.000 kelahiran hidup, 15 bayi yang baru lahir meninggal pada bulan pertama kehidupan dan 31 meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun.

Mayoritas perempuan dapat mengakses layanan persalinan dan 98 persen kelahiran dibantu oleh penolong persalinan terlatih. Namun, layanan kesehatan reproduksi tetap masih perlu perbaikan,

termasuk dalam hal peningkatan akses terhadap metode kontrasepsi modern.

Pada tahun 2015, delapan di antara 10 bayi menerima tiga dosis vaksin DTP yang dianjurkan, dan 84 persen bayi menerima vaksinasi campak. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk mencapai dan mempertahankan cakupan imunisasi yang tinggi, termasuk di antara bayi dari rumah tangga termiskin.

Ketimpangan berdasarkan tingkat pendapatan pada kesehatan ibu dan anak



TUJUAN 4

PENDIDIKAN BERKUALITAS

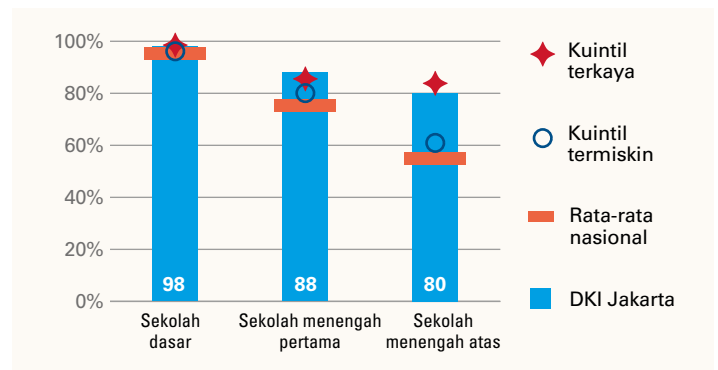


Kesiapan anak untuk masuk sekolah dasar dapat ditingkatkan dengan memasukkan anak ke program perkembangan anak usia dini. Angka partisipasi dalam pembelajaran PAUD yang terorganisir di kalangan anak usia 6 tahun mencapai 97 persen pada tahun 2015, dan banyak di antaranya masuk sekolah dasar lebih cepat.

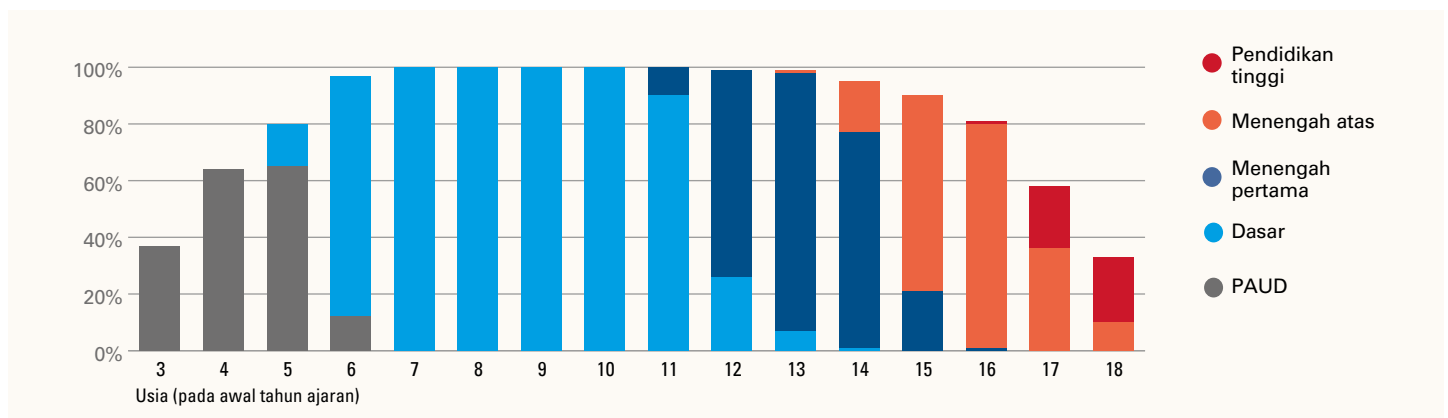
Provinsi DKI Jakarta hampir mencapai akses universal pendidikan dasar. Namun, anak-anak dari rumah tangga termiskin berpeluang lebih rendah untuk menyelesaikan sekolah menengah dibandingkan anak-anak dari keluarga yang lebih kaya.

Kualitas pendidikan masih menjadi masalah utama. Provinsi ini berkinerja sama dengan rata-rata nasional, dengan hanya setengah anak sekolah dasar mampu mencapai ambang batas nasional minimum dalam kemampuan membaca dan seperempat dalam kemampuan matematika.

Ketimpangan berdasarkan tingkat pendapatan pada angka penyelesaian sekolah



Persentase anak-anak dan remaja yang masuk sekolah berdasarkan usia



TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER



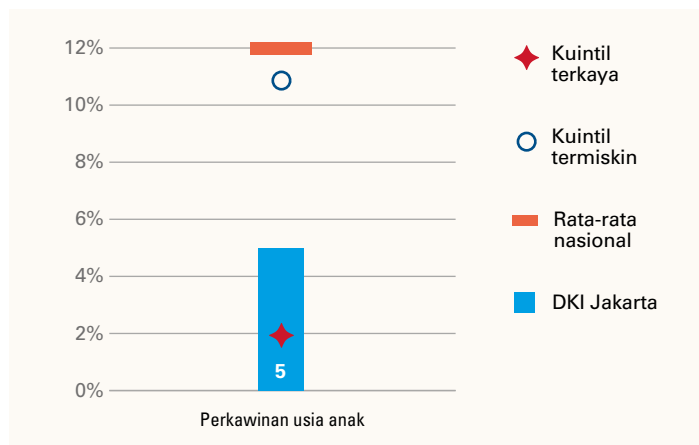
Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat perkawinan usia anak terendah keempat di Indonesia. Sekitar 5 persen perempuan usia 20–24 tahun sudah menikah atau hidup bersama sebelum berusia 18 tahun pada tahun 2015. Tingkat pernikahan anak jauh lebih tinggi di kalangan anak perempuan dari rumah tangga termiskin.

Tidak ada data yang representatif tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di tingkat provinsi. Namun, data dari survei nasional menunjukkan bahwa jenis kekerasan ini tersebar luas: Sebanyak 28 persen dari perempuan dan anak perempuan yang pernah memiliki pasangan pernah mengalami kekerasan fisik, seksual, dan/atau psikologis yang dilakukan oleh mantan atau pasangan intimnya saat ini.

5% perempuan menikah sebelum berusia 18



Ketimpangan berdasarkan tingkat pendapatan pada perkawinan usia anak



TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI

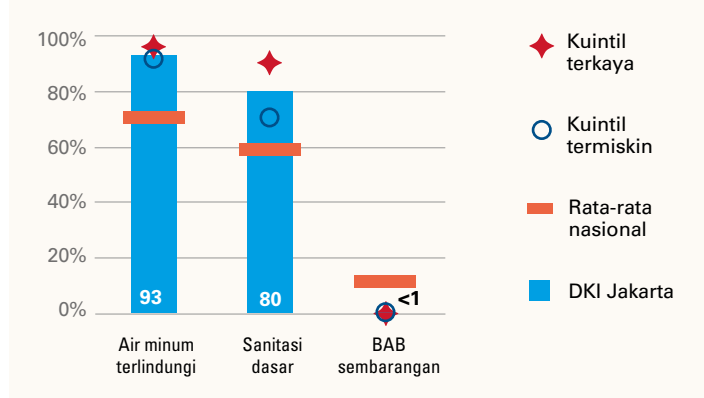


Pencapaian akses universal terhadap air minum, sanitasi, dan higienitas sangat penting untuk mempercepat kemajuan di bidang kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan. Provinsi ini berhasil menghilangkan kebiasaan BAB sembarangan, sementara delapan di antara 10 orang menggunakan fasilitas sanitasi dasar di rumah pada tahun 2015. Akses terhadap sumber air minum

yang layak sudah jauh melebihi 90 persen, baik di rumah tangga maupun sekolah.²

Namun, terdapat ketimpangan berarti dalam cakupan sanitasi, dengan perbedaan 20 poin persentase antara rumah tangga termiskin dan terkaya. Selain itu, hanya 59 persen sekolah sudah memiliki fasilitas toilet terpisah untuk laki-laki dan perempuan.

Ketimpangan berdasarkan tingkat pendapatan pada akses air dan sanitasi



sekolah dengan layanan air dasar = 99%

Lingkungan sekolah

Sekolah dengan layanan air dasar (%)	99
Sekolah dengan fasilitas sanitasi terpisah menurut jenis kelamin (%)	59

Komunitas

Desa dan kelurahan yang menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (%)	2
--	---

TUJUAN 16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG KUAT

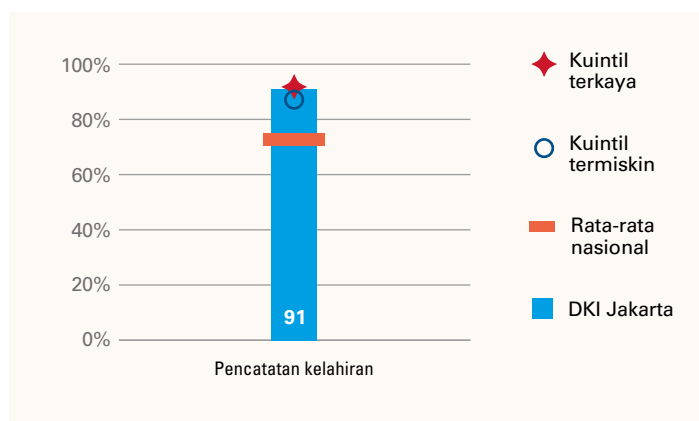


Saat ini proses peningkatan cakupan pencatatan kelahiran masih berjalan. Pada tahun 2015, sekitar 91 persen anak di bawah usia 5 tahun telah memiliki akta lahir. Perbedaan berdasarkan status kekayaan rumah tangga relatif kecil.

Anak dalam tahanan masih menjadi bentuk hukuman yang umum bagi anak yang melakukan tindak pidana, yang mana hal ini melanggar prinsip bahwa penahanan anak harus merupakan pilihan terakhir. Di Provinsi DKI Jakarta, 48 persen dari seluruh anak yang ditahan belum mendapatkan putusan pengadilan, salah satu angka tertinggi di Indonesia.

Hanya ada sedikit atau tidak ada data sama sekali tentang masalah perlindungan anak, seperti kekerasan terhadap anak maupun perdagangan anak.

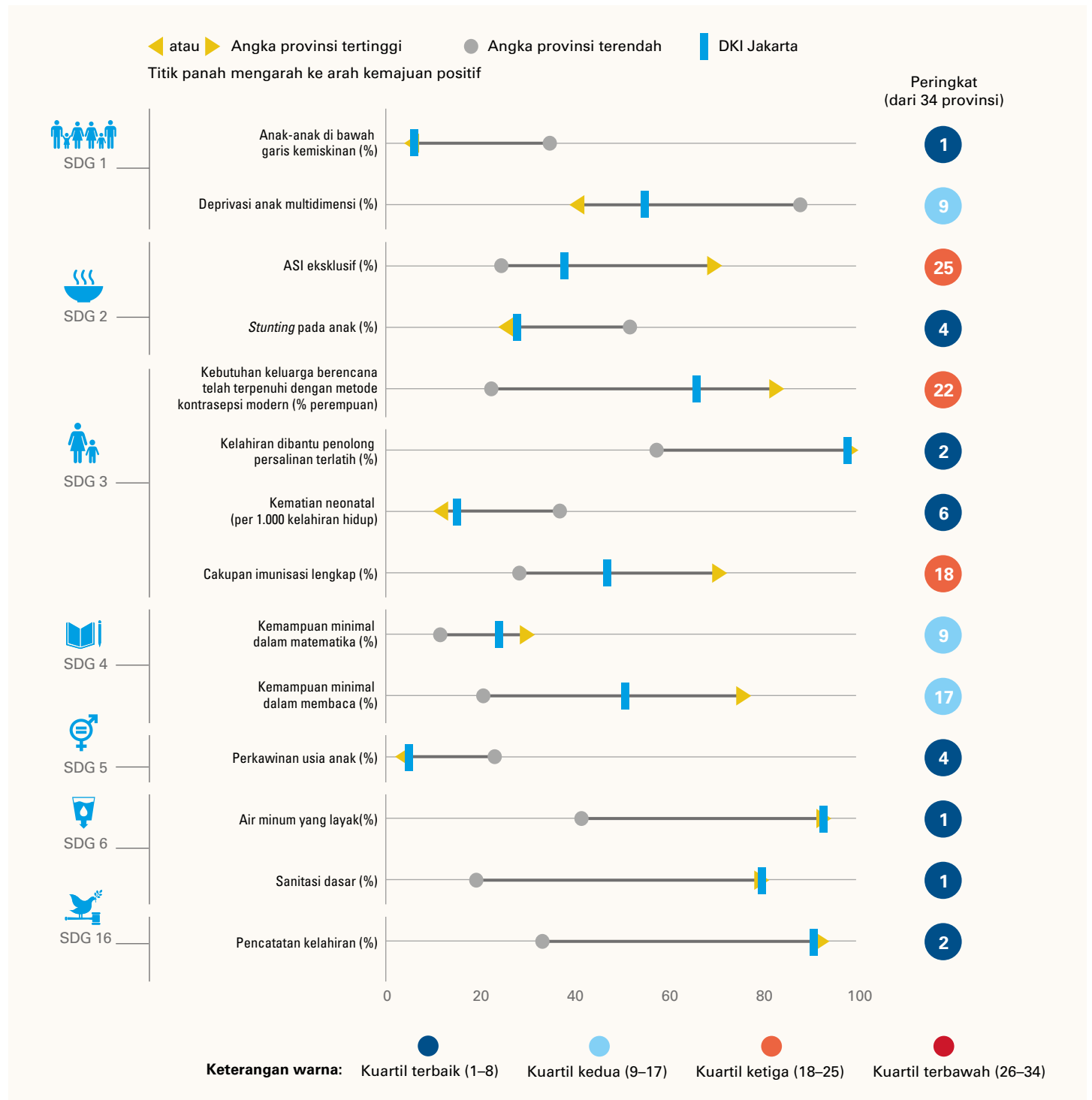
Ketimpangan berdasarkan tingkat pendapatan pada pencatatan kelahiran



KARTU NILAI (SCORECARD) PROVINSI

Kartu nilai ini berisi ringkasan kinerja Provinsi DKI Jakarta dalam beberapa indikator SDG dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Grafik di bawah ini menunjukkan nilai rata-rata Provinsi DKI Jakarta dan provinsi-provinsi dengan nilai tertinggi dan terendah untuk tiap indikator.

Di sisi kanan tercantum peringkat Provinsi DKI Jakarta untuk setiap indikator, yaitu antara peringkat 1 untuk kinerja tertinggi dan 34 untuk kinerja terendah. Data menurut provinsi di Indonesia dibagi menjadi empat kuartil (biru tua untuk kuartil terbaik dan merah untuk kuartil terbawah).



Catatan

Sumber: Survei rumah tangga nasional (SUSENAS, RISKESDAS, SDKI) dan data administratif (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan). Informasi terperinci tentang sumber data dan definisi indikator tersedia *online* di: <https://sdg4children.or.id>

- 1 Kemiskinan anak multidimensi didefinisikan sebagai anak-anak yang mengalami deprivasi pada setidaknya dua dimensi berikut: pangan dan gizi; kesehatan; pendidikan; perumahan; air dan sanitasi; dan perlindungan.
- 2 Saat ini, Indonesia masih belum memiliki data nasional yang representatif tentang kualitas air yang dapat digunakan untuk menghitung indikator SDG terkait penggunaan layanan air minum yang dikelola secara aman. Namun setidaknya telah digunakan indikator *proxy* dalam menyusun *baseline data* untuk SDG 6.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami di: jakarta@unicef.org